

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil akhir dari sebuah penelitian berupa kesimpulan dan rekomendasi yang dapat berguna bagi semua pihak. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Mekanisme Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Era Otonomi Daerah, dapat disimpulkan hal-hal berikut ini :

1. Mekanisme Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pada Era Otonomi Daerah

- a. Mekanisme pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada era otonomi daerah yang dilaksanakan saat ini kewenangannya yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah masih setengah-setengah yaitu seperti kewenangan penuh terhadap penetapan formasi yang masih berada di tangan pemerintah pusat, hal ini membuktikan bahwa untuk hal-hal yang berkaitan erat dengan pengangkatan CPNS yang bersifat urgen masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
- b. Belum terciptanya suatu koordinasi yang baik antara PEMDA Kabupaten Ciamis yang dalam hal ini adalah pihak BKD dengan sejumlah instansi pemerintahan di lingkungan PEMDA Ciamis, hal ini terlihat bahwa dalam pengajuan formasi pegawai ternyata masih ada instansi yang tidak dilibatkan

secara langsung untuk mengajukan usulan kebutuhan pegawai dari instansi tersebut.

- c. Mekanisme pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada era otonomi daerah yang dilaksanakan oleh PEMDA Kabupaten Ciamis masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari pengelolaan pemerintahan untuk urusan-urusan tertentu, PEMDA masih tergantung pada pemerintah di atasnya dan terdapat kesan bahwa PEMDA belum siap dengan otonomi daerah, terutama dalam pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada era otonomi daerah ini.

2. Keberhasilan PEMDA Kabupaten Ciamis Dalam Penempatan CPNS Untuk Dialokasikan Pada Instansi Pemerintahan Yang Sesuai Dengan Latar Belakang Pendidikan CPNS Tersebut.

PEMDA Kabupaten Ciamis belum optimal dan belum mampu menunjukkan keberhasilan dalam penempatan CPNS pada dinas/instansi pemerintahan di lingkungan PEMDA Kabupaten Ciamis. Pada kenyataannya hampir sebagian besar PNS yang bekerja pada dinas/instansi pemerintahan di Kabupaten Ciamis, tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, sehingga permasalahan ini akan berdampak pada kinerja aparat pemerintahan tersebut bekerja tidak profesional.

3. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh PEMDA Kabupaten Ciamis Dalam Urusan Pengangkatan CPNS.

- a. Usulan kebutuhan pegawai yang diajukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat ternyata belum mampu direalisasikan seluruhnya oleh pemerintah pusat.
- b. Panitia pengangkatan CPNS sering keliru dalam proses pemeriksaan berkas lamaran yang merupakan tahap seleksi administrasi, seperti kesalahan dalam mengklasifikasikan berkas lamaran.
- c. Kesulitan panitia dalam memadukan kecocokan latar belakang pendidikan pelamar dengan jenjang pendidikan yang dibutuhkan dalam formasi tersebut, serta
- d. Keterlambatan datangnya berkas lamaran kepada pihak BKD.

4. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan dalam pengangkatan CPNS adalah :

- a. Usulan kebutuhan pegawai dari tiap-tiap instansi/dinas yang diusulkan kepada pemerintah pusat melalui PEMDA Ciamis yang belum dapat direalisasikan sepenuhnya, maka kekurangan pegawai tersebut akan selalu diusulkan kepada pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ciamis pada tiap tahunnya, sementara kekurangan pegawai akan ditutupi dengan adanya kebijakan PEMDA Ciamis yaitu adanya penerimaan SUKWAN dan TKK/Honorer sebagai pegawai yang diperbantukan pada dinas/instansi tertentu.

- b. Kesalahan yang berupa teknis dalam pengangkatan CPNS, kini PEMDA Ciamis telah menyiapkan kepanitiaan yang secara khusus bekerja secara *intensif* dalam pelaksanaan pengangkatan CPNS tersebut. Sementara itu kesalahan PEMDA dalam seleksi administrasi, maka kepanitiaan dalam pengangkatan CPNS tersebut, selalu melakukan pemeriksaan ulang dengan tujuan untuk meminimalisir terhadap terjadinya kesalahan tersebut.
- c. Pihak BKD memiliki kebijakan dalam memadukan kecocokan latar belakang pendidikan pelamar dengan jenjang pendidikan yang dibutuhkan dalam formasi yaitu dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan pelamar dengan jenjang pendidikan dalam formasi, artinya jenjang pendidikan yang memiliki kemiripan dengan jenjang pendidikan dalam formasi akan tetap diikutsertakan dalam seleksi pengangkatan CPNS tersebut.
- d. Sementara itu hambatan yang berkaitan erat dengan keterlambatan berkas lamaran yang datang kepada pihak BKD, maka pihak BKD memiliki kebijakan untuk tetap menerima dan memproses lamaran tersebut untuk diseleksi dengan catatan cap pos surat pada lamaran tersebut masih dalam batas waktu pengumpulan berkas lamaran.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan penulis yang berkaitan erat dengan pengangkatan CPNS tersebut, maka dengan maksud untuk perbaikan dalam prosedur

pengangkatan CPNS pada era otonomi daerah ini, penulis mengajukan beberapa rekomendasi yang membangun untuk kemajuan pada masa yang akan datang, diantaranya berkaitan dengan :

1. Mekanisme Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pada Era Otonomi Daerah, diharapkan :

- a. Pemerintah Pusat diharapkan mampu memberikan kewenangan yang jauh lebih besar kepada PEMDA sebab pada dasarnya, kedewasaan dan keberhasilan pembangunan di daerah akan berhasil dengan adanya kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelolanya, sehingga diharapkan akan menciptakan kemandirian yang jauh lebih besar bagi daerah tentunya yang dilandasi oleh prinsip-prinsip otonomi daerah
- b. PEMDA Kabupaten Ciamis dalam hal ini yaitu pihak BKD seharusnya lebih *intensif* dalam menjalankan setiap prosedur pengangkatan CPNS dengan baik. Selain itu diharapkan pihak BKD dapat menjalin suatu koordinasi yang baik dengan seluruh instansi di lingkungan PEMDA Kabupaten Ciamis, dengan harapan kekurangan pegawai pada tiap instansi bisa tersampaikan melalui adanya usulan kebutuhan pegawai dari instansi tersebut.
- c. Bagi para pelamar diharapkan mampu memperhatikan sekaligus mengindahkan segala ketentuan dalam pengangkatan CPNS, sehingga diharapkan tidak akan terjadi lagi berbagai hambatan dari pihak pelamar selama proses seleksi pengangkatan CPNS.

2. Keberhasilan PEMDA Kabupaten Ciamis Dalam Penempatan CPNS Untuk Dialokasikan Pada Instansi Pemerintahan Yang Sesuai Dengan Latar Belakang Pendidikan CPNS Tersebut.

- a. Pihak BKD diharapkan lebih teliti dalam menempatkan CPNS pada instansi pemerintahan untuk memperhatikan latar pendidikan CPNS agar ditempatkan pada instansi pemerintahan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya itu.
- b. Pihak BKD diharapkan dapat memperhatikan pula pada setiap usulan jenjang pendidikan kebutuhan pegawai yang diajukan dari tiap-tiap dinas/instansi pemerintahan sehingga dengan demikian BKD akan tepat dalam menempatkan CPNS sesuai dengan kebutuhan setiap dinas/instansi di PEMDA Kabupaten Ciamis.
- c. Penempatan pegawai yang belum dapat dilakukan sesuai dengan latar belakang pendidikan CPNS tersebut, maka seharusnya secara intern pegawai tersebut dilakukan pembinaan dan pelatihan oleh atasannya pada instansi tersebut.

3. Hambatan-hambatan Yang Dialami Oleh PEMDA Kabupaten Ciamis Dalam Urusan Pengangkatan CPNS, diharapkan :

- a. Pemerintah pusat lebih bijaksana dalam menetapkan formasi pengangkatan CPNS, sebab pada dasarnya pemerintah daerah sangat mengharapkan untuk mendapatkan calon-calon aparat pemerintahan yang memiliki kualitas baik dan kuantitas yang memadai.

- b. Pemerintah daerah terutama pihak BKD diharapkan mampu meningkatkan kinerja dalam proses pengangkatan CPNS sehingga diharapkan segala hambatan yang berasal dari pihak BKD mampu diminimalisir sebaik mungkin.
- c. Bagi para pelamar seharusnya lebih memperhatikan ketentuan selama pengangkatan CPNS sehingga keterlamabatan masuknya berkas kepada pihak BKD tidak akan terulang kembali.

4. Upaya-upaya yang dilakukan oleh PEMDA Kabupaten Ciamis dalam menanggulangi setiap hambatan yang terjadi selama proses pengangkatan CPNS, diharapkan :

- a. Pemerintah pusat sebaiknya lebih memberikan kebijaksanaan yang baik bagi pemerintah daerah untuk memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola dan melaksanakan pengangkatan CPNS di daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah.
- b. Seharusnya terjalin koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (BKD), dinas/instansi pemerintahan di daerah, dan para pelamar, sehingga diharapkan dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik tersebut dapat menghasilkan suatu harapan yang baik pula yaitu mendapat CPNS yang profesional.